

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG
USAHA PADA PT. PELABUHAN INDONESIA I
(PERSERO) MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : INDRI ARDIYANTI
NPM : 1405170824
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **INDRI ARDIYANTI**
NPM : **145170825**
Jurusan : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG USAHA PADA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) MEDAN**

Dinyatakan : *(CIB) Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Drs. SUCIPTO, Ak, M.M

Drs. ABDUL HASYIM BATUBARA, MM, Ak

Penyelia

Dra. IJAH MULYANI SIHOTANG, M.Si

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



RIJANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : INDRI ARDIYANTI
N.P.M : 1405170824
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PIUTANG USAHA PADA PT. PELABUHAN
INDONESIA I (PERSERO) MEDAN

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dra. IJAH MULYANI SIHOTANG, M.Si

Diketahui/ Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **INDRI ARDIYANTI**
NPM : **1405170824**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI KEUANGAN**
Judul Penelitian : **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG USAHA PADA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) MEDAN**

Tanggal	Bimbingan Materi Proposal	Paraf	Keterangan
20/2-18	Kisi-kisi abstrak		
24/2-18	Pemaparan tentang kondisi SPI pd perusahaan hrs mengemukakan 5 masalah		
10/3-18	Draftan w. cara hrs me. Mulyani 1 pertemuan. Prinsipal & bea pd peng. adalah Prinsipal pokoknya hrs Jodi pertanyaan mt pengurusan hrs ab detail		
15/3-18	Acc Sibay		

Medan, Februari 2018

Pembimbing Skripsi

(Dra. LIAH MULYANI, S.E., M.Si)

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indri Ardiyanti

NPM : 1405170824

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan .

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang berlokasi Jl. Krakatau Ujung No.100 Tj. Mulia Medan-20241.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan,



Indri Ardiyanti

1405170824

ABSTRAK

INDRI ARDIYANTI, NPM : 1405170824. Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Skripsi, tahun 2018.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis : Analisis sistem pengendalian intern Piutang usaha pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang berlokasi Jl. Krakatau Ujung No.100 Tj. Mulia Medan-20241 Telp. (061) 6610220, Fax.6610906. waktu penelitian dimulai bulan Desember 2017 sampai dengan selesai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan?

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel penelitian adalah data kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara, Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dengan cara membandingkan sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dengan sistem pengendalian intern menurut COSO, sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum mencapai tujuan dari sistem pengendalian intern. Hal ini dikarenakan ada beberapa unsur sistem pengendalian intern piutang usaha pada perusahaan belum berjalan dengan baik.

Kata kunci : Piutang Usaha, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern Piutang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena atas rahmat dan hidayah-Nya dan juga shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi dan Rasul yaitu Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan**”.

Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan dan untuk mendapatkan maupun meraih gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa isi kandungan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tetapi penulis telah berusaha untuk mendekati kesempurnaan. Namun atas karunia dan Hidayah dari Allah SAW serta bantuan dan partisipasi berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya meskipun masih banyak kekurangan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik, saran dan juga motivasi yang sifatnya membangun dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Dalam kesempatan ini maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda tercinta SUNAR dan ibunda tercinta RUSDIYANI dan adik-adik saya Alwi Rangga Prabowo dan Tri Ajeng Ardini yang telah memberikkan kasih sayang yang berlimpah, motivasi, dukungan moril serta do'a nya yang tidak pernah henti kepada saya. Semoga saya berhasil dan dapat mewujudkan impian dan membahagiakan mereka.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Ijah Mulyani Sihotang M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada saya selaku penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Seprida Hanum SE, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.

9. Bapak/Ibu Dosen selaku staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
10. Kepada Ibu Linda Harahap dan seluruh staff PT. Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan riset sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat saya kelas G akuntansi siang yang telah memberi semangat motivasi dan do'a sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan yang telah memberi semangat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Amin ya

INDRI ARDIYANTI
NPM : 1405170824

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Sistem Pengendalian Intern	8
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	8
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	10
c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern	12
d. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal	19
e. Prinsip-Prinsip Pengendalian Intern.....	22
2. Piutang Usaha	24
a. Pengertian Piutang Usaha.....	24
b. Kebijakan Penjualan Kredit.....	27
c. Manfaat Penjualan Kredit.....	28
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Piutang	29
e. Administrasi Piutang	31
f. Prosedur Penagihan	34
3. Penelitian Terdahulu	37
B. Kerangka Berfikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Definisi Operasional Variabel	40

C. Tempat dan Waktu Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran umum perusahaan	47
a. Sejarah Singkat Perusahaan.....	47
b. Ruang Lingkup Perusahaan.....	49
c. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas	50
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan	57
B. Pembahasan	66
1. Lingkungan Pengendalian	67
2. Penaksiran Resiko.....	69
3. Aktivitas Pengendalian	70
4. Informasi dan Komunikasi	71
5. Pengawasan	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Data Piutang Usaha 5 (Lima) Tahunan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.....	3
Tabel II-1 Rasio yang Berhubungan dengan Piutang Usaha Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.....	4
Tabel III-1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel IV-1 Waktu Penelitian	42
Tabel V-1 Kisi-Kisi Wawancara	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I-1 Kerangka Berfikir	39
Gambar II-1 Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa saat ini banyak sekali jenis-jenis usaha yang terdiri dari perusahaan jasa, manufaktur, perbankan, perusahaan dagang dan lain-lainnya. Pada umumnya setiap perusahaan didirikan dengan tujuan menghasilkan laba, tumbuh dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Laba yang maksimal dapat diperoleh dari melalui peningkatan volume penjualan. Semakin tinggi volume penjualan, maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh. Penjualan merupakan unsur utama dalam memperbesar laba disamping unsur-unsur lain seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan penjualan kepada para konsumen, perusahaan dapat melakukan penjualan dalam bentuk tunai maupun secara kredit, dari pihak perusahaan sudah tentu lebih menyukai penjualan secara tunai, karena perusahaan akan segera menerima kas dan kas tersebut akan diputar kembali untuk mendapatkan pendapatan selanjutnya semakin sering dana berputar maka laba semakin meningkat. Bagi pihak lain terutama konsumen lebih menyukai jika perusahaan dapat melakukan penjualan secara kredit karena pembayaran dapat ditunda dan dapat dicicil. Dalam kenyataannya hampir semua perusahaan penjualan kredit jauh lebih besar dari pada penjualan tunai. Maka dari penjualan kredit tersebut akan timbul akun piutang.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa seperti PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan yang menjadi fokus utama adalah penjualan secara kredit. Pada

penjualan kredit perusahaan tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang kepada para konsumen atau disebut dengan piutang usaha, dan pada hari jatuh tempo, terjadi aliran kas masuk (*cash in flow*) yang berasal dari pengumpulan piutang usaha tersebut.

Piutang usaha merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar serta bagian terbesar dari total aktiva perusahaan. Menurut Iwan Setiawan (2010:199). Piutang usaha merupakan salah satu unsur terpenting dalam aktiva lancar karena biasanya hanya membutuhkan satu tahapan lagi untuk konversi menjadi kas. Oleh karena itu sistem pengendalian intern sangat penting untuk diterapkan. Kecurangan sering terjadi dalam siklus kerja yang dapat merugikan suatu perusahaan.

Kecurangan yang mungkin terjadi pada bagian piutang adalah tidak mencatat pembayaran dari debitur dan menunda mencatat pembayaran piutang (*cash lapping*) sehingga dana piutang yang sudah dibayar tertunda masuk kedalam kas perusahaan, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang dan lain sebagainya. Pengendalian intern merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam mengantisipasi kecurangan. Pengendalian intern merupakan suatu cara organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, mendorong dipatuhinya manajemen yang sudah ditetapkan.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan merupakan salah satu BUMN yang dipercaya oleh pemerintah dalam mengembangkan sektor penyediaan dan pengelolaan jasa transportasi air, khususnya laut. Untuk mendukung pengangkutan laut inilah yang dibutuhkan pelabuhan yang merupakan simpul sistem pengangkutan laut dengan darat. Pada masa kini, meskipun banyak orang

yang memilih menggunakan pesawat terbang sebagai sarana angkutan yang paling cepat. Tetapi, fungsi pelabuhan laut tidak berkurang. Karena daya angkut kapal yang sangat besar yang merupakan daya tarik tersendiri bagi dunia perdagangan. Semakin banyaknya kapal yang tambat dan bongkar muat semakin besar pula pendapatan yang akan diterima perusahaan. Pendapatan merupakan unsur utama dalam memperbesar laba disamping unsur-unsur lain seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain.

Dimana didalam kegiatannya perusahaan masih belum mengelola piutangnya dengan baik, hal ini dilihat dari laporan keuangan yang ada pada perusahaan berikut :

Tabel I-1
Data piutang Usaha 5 (lima) Tahunan
Tahun 2012 s/d 2016 (dalam jumlah rupiah)
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) MEDAN

Tahun	Jumlah Piutang	Jumlah piutang tak tertagih	Persentase piutang taktertagih
2012	68.627.373.557	48.968.148.546	71%
2013	88.233.772.279	61.599.805.658	70%
2014	85.503.925.290	79.885.373.510	93%
2015	155.877.564.385	84.757.392.602	54%
2016	125.321.592.573	54.410.007.969	43%

Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan

Tabel II-1
Rasio yang berhubungan dengan piutang usaha
Tahun 2012 s/d 2016 (dalam jumlah rupiah)
PT.PELABUHAN INDONESIA I (PESERO) MEDAN

Tahun	Rasio perputaran piutang (RTO)	Umur-rata piutang (ACP)	Standar industri (RTO)	Standar industri (ACP)
2012	19	19	15 kali	25 hari
2013	20	18		
2014	20	18		
2015	16	23		
2016	14	26		

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah piutang mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016, jumlah piutang tak tertagih mengalami peningkatan pada tahun 2012 sampai dengan 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016, dan persentase piutang taktertagih mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 2016.

Jika dilihat dari data di atas adanya peningkatan piutang takterttagih maka tujuan sistem pengendalian intern yang tidak efektif yaitu mengamankan sumber daya terhadap kemungkinan kerugian akibat pelepasan, penyalagunaan kesalahan pengelolaan, kekeliruan, kecurangan serta membuat data keuangan serta pengungkapan yang wajar pada pelaporan yang tepat.

Agar terlaksananya pengendalian intern dan administrasi yang baik dan efektif, diperlukan sistem pengendalian intern yang dirancang secara efektif guna untuk pelaksanaan pengumpulan piutang tak tertagih dapat berjalan dengan baik dan memadai.

Fenomena yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan masih terdapat peningkatan piutang tak tertagih bertentangan dengan teori Warren Reeve Fess (2005:407) yang menyatakan bahwa,

Apabila jumlah piutang yang semakin meningkat memberikan tantangan bagi perusahaan untuk dapat mengelola piutang dengan efektif. Karena jika terlalu besar jumlah saldo piutang tak tertagih ataupun jumlah saldo piutang ragu-ragu tidak efektifnya pengendalian terhadap manajer yang memutuskan kredit atau tidak efektifnya bagian piutang yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perusahaan”.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap piutang usaha karena piutang usaha semakin meningkat dari tahun ketahun. Hal tersebut bertentangan dengan teori COSO (*Commitee of sponsoring Organization*) menyatakan bahwa, “Pemeriksaan merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan manajemen dan bahwa resiko sudah diantisipasi ”.

Oleh karena itu, pentingnya sistem pengendalian intern yang efektif dalam pengelolaan piutang usaha yang baik sehingga dapat meminimalisasikan resiko piutang tak tertagih yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, agar manfaat yang di peroleh perusahaan dimasa yang akan datang sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Sehubungan dengan piutang yang dialami perusahaan maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadinya peningkatan jumlah piutang tak tertagih dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.
2. Kurangnya pengawasan atas pengecekan piutang usaha sehingga menyebabkan meningkatnya piutang takterttagih dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

C. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian piutang usaha.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan penerapan dari ilmu ekonomi khususnya akuntansi keuangan yang telah didapat dari proses belajar menulis sehingga dapat menambah wawasan penulis mengenai bagaimana penerapan teori dengan dengan praktek didunia kerja yang sebenarnya.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengendalian intern piutang usaha.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan alat yang dapat membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mempunyai peranan yang cukup penting bagi perusahaan sehingga pimpinan dapat melihat dan menilai struktur organisasi yang ada pada kegiatan yang dilaksanakannya.

COSO mengeluarkan definisi tentang pengendalian intern pada tahun 1992. COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang menembus seluruh organisasi. COSO juga membuat jelas bahwa pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pengendalian bukanlah sesuatu yang ditambahkan kedalam proses manajemen tersebut, akan tetapi merupakan bagian integral (bagian tak terpisahkan) dalam proses tersebut.

Model COSO adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi, mengembangkan *internal control*.

Menurut model COSO, *internal control* adalah suatu proses, melibatkan seluruh anggota organisasi, dan memiliki 3 tujuan utama yaitu : efektifitas dan efisiensi operasi, mendorong keandalan laporan keuangan dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang ada. Artinya dengan adanya sistem pengendalian internal,

maka diharapkan perusahaan dapat bekerja atau beroperasi secara efektif dan efisien, menyajikan informasi dapat diyakini kebenarannya dan semua pihak akan mamatuhi semua peraturan dan kebijakan yang ada baik peraturan dan kebijakan perusahaan ataupun aturan (legal/hukum) pemerintah.

Muliyadi (2001, hal:163) sistem pengendalian intern meliputi : (1) Struktur organisasi, (2) Metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, (3) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (4) Mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sesuai dengan perkembangan jaman dan juga perkembangan dunia usaha, istilah pengendalian internal pun mengalami perkembangan, tidak hanya untuk mengawasi kecermatan pembukuan, mempunyai arti luas yaitu meliputi seluruh organisasi perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh William Thomas (2002, hal 233) bahwa dalam tujuan dilaksanakannya pengendalian intern yang dirancang untuk memenuhi berbagai tujuan, antara lain:

- a. Menjaga aset
- b. Mendorong karyawan untuk memenuhi kebijakan perusahaan
- c. Mempromosikan efisiensi operasional
- d. memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan
- e. menaati persyaratan hukum

Dalam arti luas pengendalian intern dapat dibagi dua yaitu: Pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi, Pengendalian administratif meliputi rencana organisasi dan semua cara prosedur-prosedur yang berhubungan dengan efisien usaha ketaatan terhadap kebijakan perusahaan. Pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara serta prosedur-prosedur yang

dihubungkan dengan pengamanan hak milik perusahaan serta dapat dipercayanya laporan keuangan.

Sedangkan menurut Warren Reeve Fess (2006, hal,235) pengertian pengendalian intern (internal control) adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat yang dapat dipercaya, melindungi kekayaan atau aktiva perusahaan dan meningkatkan efektivitas dari seluruh anggota perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Mulyadi (2001, hal 178) menjelaskan tujuan pengendalian intern secara lebih terperinci, sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan perusahaan
 - a). Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan.
 - b). Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
 - a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otoritas yang telah ditetapkan.
 - b. Penataan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi

Tujuan tersebut dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan

- a. Pembatasan akses langsung terhadap kekayaan
 - b. Pembatasan akses tidak langsung terhadap kekayaan.
2. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada.
- a. Perbandingan secara periode antara catatan akuntansi dengan kekayaan yang sesungguhnya ada.
 - b. Rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan
3. Perkembangan melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan
- a. Pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
4. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi
- a. Pencatatan sesuai transaksi yang terjadi.
 - b. Transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi.
 - c. Transaksi dicatat dalam jumlah yang benar.
 - d. Transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya
 - e. Transaksi dicatat dalam pengelolaan yang sebenarnya
 - f. Transaksi dicatat dan diringkaskan dengan teliti

Pengendalian intern dapat dilaksanakan memadai bila dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Keadaan pelaporan keuangan

Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk menyatakan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan

ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggungjawab pelaporan keuangan ini.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efektivitas untuk mengoptimalkan sasaran yang ditunjukkan perusahaan.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pihak penghasilan dan kecurangan.

c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Model (*framework*) COSO terdiri dari lima komponen (unsur-unsur) yang saling berhubungan akan menunjang pencapaian tujuan perusahaan yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Komponen yang berperan dalam membangun atmosfer (iklim) yang kondusif bagi para karyawan mengenai kesadaran pentingnya kontrol sehingga dapat menciptakan suasana yang dapat membuat karyawan dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas kontrol dan tanggung jawabnya masing-masing.

2. Penaksiran Resiko

Merupakan proses identifikasi dan analisis resiko yang dapat menghambat atau berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, serta menentukan cara bagaimana resiko tersebut ditangani. COSO mengarahkan kita melakukan

identifikasi terhadap resiko internal maupun eksternal dari aktivitas suatu entity atau individu.

3. Aktivitas Pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan manajemen dan bahwa resiko sudah diantisipasi. Control Activities juga membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk penanganan resiko telah dilakukan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk penanganan resiko telah dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.

a. Aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong akurasi

financial reporting :

- § Pemisahan tugas dan fungsi
- § Otorisasi yang memadai
- § Dokumentasi yang layak
- § Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan akuntansi
- § Verifikasi independen atau review atas kegiatan

b. Aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong kinerja

c. Aktivitas pengendalian yang ditunjukkan untuk mendorong keandalan *information processing*.

4. Informasi dan Komunikasi

Komponen ini menjelaskan bahwa sistem informasi sangat penting bagi keberhasilan atau peningkatan mutu operasional organisasi. Informasi baik yang diperoleh dari eksternal maupun dari pengolahan internal merupakan potensi strategi.

5. Pengawasan

Komponen pengawasan dijelaskan dalam COSO memastikan keandalan sistem dan *internal control* dari waktu ke waktu. Pengawasan merupakan proses yang menilai kualitas dari kinerja sistem dan *internal control* dari waktu ke waktu, yang dilakukan dengan melakukan aktivitas pengawasan dan melakukan evaluasi secara terpisah.

Unsur-unsur pokok pengendalian intern menurut Mulyadi (2001 : 165) adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini :
 - a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpangan dari fungsi akuntansi. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
 - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk menyetujui terjadinya transaksi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi.

- a. Kepala fungsi gudang berwenang mengajukan permintaan pembelian dengan surat permintaan pembelian yang ditunjukkan kepada fungsi pembelian.
 - b. Kepala fungsi pembelian: berwenang memberikan otorisasi pada surat order pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
 - b. Pemeriksaan mendadak hal ini mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
 - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh:

- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
- b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntunan perkembangan pekerjaannya.

Menurut Romney (2004, hal 42) ada dua pertimbangan pengendalian intern yaitu:

1. Dokumentasi yang memadai

Dokumentasi yang memadai atas semua transaksi adalah akuntabilitas. Dokumen memungkinkan para manajer memverifikasi bahwa tanggung jawab yang diberikan telah dilakukan dengan benar. Dokumentasi dan catatan yang didesain dengan baik dapat membantu organisasi untuk secara cepat untuk mengidentifikasi masalah yang sering muncul. Dokumentasi dan catatan yang memadai juga dapat memastikan bahwa organisasi dapat terjaga komitmennya.

2. Pemisahan tugas

Pemisahan tugas berkenan dengan pembagian tanggungjawab ke beberapa pegawai atas bagian-bagian transaksi. Tujuannya adalah mencegah seorang pegawai memiliki pengendalian penuh atas seluruh aspek transaksi bisnis. Pemisahan tugas juga penting di dalam aktivitas bisnis yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran uang kas, karena kas dapat mudah dicari.

Menurut Marshall B. Romney (2001, hal 236) unsur-unsur pengendalian intern merupakan kebijakan dan peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen dicapai. Secara umum prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam unsur pokok pengendalian.

1. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai

Para pegawai melaksanakan tugas dan membuat keputusan yang mempengaruhi asset perusahaan. Oleh karena pihak manajemen kekurangan waktu dan sumber daya untuk melakukan supervise setiap aktivitas dan keputusan mereka membuat kebijakan untuk diikuti oleh para pegawai dan kemudian memberdayakan mereka untuk melaksanakannya.

2. Pemisahan Tugas

Pengendalian intern yang baik masyarakat bahwa tidak ada pegawai yang diberikan tanggungjawab terlalu banyak. Seseorang pegawai seharusnya tidak berada dalam posisi untuk melakukan penipuan dan menyembunyikan penipuan tua kesalahan yang tidak disengaja.

- a. Otorisasi menyetujui transaksi dan keputusan
- b. Pencatatan mempersiapkan dokumen sumber, memelihara catatan jurnal, buku besar dari file lainnya, mempersiapkan rekonsiliasi, serta laporan kerja
- c. Penyimpanan menangani kas, memelihara tempat penyimpanan persediaan, menerima cek yang masuk dari pelanggan, menulis atas rekening bank organisasi.

3. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai

Membantu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan. Bentuk dan isinya harus dijaga agar tetap sederhana mungkin untuk mendukung pencatatan yang efisien, meminimalkan kesalahan pencatatan dan memfasilitasi peninjauan serta verifikasi.

4. Penjagaan aset dan pencatatan yang memadai

Seorang yang berfikir tentang penjagaan aset, mereka sering kali berfikir tentang kas dan aset fisik, seperti persediaan dan perlengkapan. Akan tetapi

dimasa sekarang ini, harus diambil langkah-langkah untuk menjaga baik aset berupa informasi maupun fisik. Prosedur-prosedur berikut ini adalah untuk menjaga asset pencurian, penggunaan tanpa otorisasi dan vandalisme.

5. Pemeriksaan independen atas kerja

Pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat adalah elemen pengendalian lainnya yang penting. Pemeriksaan ini harus independen, karena pemeriksaan umum akan lebih efektif apabila dilakukan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya perasi yang diperiksa.

Menurut Sawyer's (2003, hal:61) model COSO terdiri atas lima komponen control internal yaitu:

1) Lingkungan control

Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep control secara khusus. Hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. Juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen.

2) Penentuan resiko

Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang terus berkembang. Penentuan resiko mencakup penentuan resiko semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi semua resiko. COSO juga menambahkan pertimbangan tujuan disemua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis.

3) Aktivitas Control

Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep control internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan,

tanggungjawab, dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan.

4) Informasi dan komunikasi

Komponen ini merupakan bagian dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi informasi tentang operasi kontrol internal memberikan substansi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas control dan untuk mengelola operasi.

5) Pengawasan atau pemantauan

Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan para komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Kegiatan utama dalam pengawasan meliputi survei yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban, pengauditan internal.

d. Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal harus baik dalam perusahaan agar tujuan perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan tidak ada penyalahgunaan, namun setiap sistem mempunyai kelemahan serta keterbatasan dalam proses implementasi sehingga terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian terhadap suatu perusahaan organisasi.

Hal ini disebabkan karena pengaruh dan keterbatasan bahwa yang melekat dalam pengendalian intern yaitu :

1. Pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah.
2. Pengendalian dapat merusak, karena kegagalan yang sifat manusiawi seperti kekeliruan sederhana.
3. Adanya kolusi antar personal sehingga pengendalian tidak efektif.
4. Manajemen yang mengakibatkan pengendalian intern.
5. Biaya pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian.

Adapun kelemahan dan keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Sayanton Gundodiyanto (2007, hal:253) diantaranya:

1) Persengkongkolan (kolusi)

Pengendalian intern mengusahakan agar persenggokolan dapat dihindari sejauh mungkin, misalnya dengan mengharuskan kita bertugas, larangan dalam menjalankan tugas-tugas yang bertentangan oleh mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan mengambil cuti dan seharusnya. Akan tetapi pengendalian tidak dapat menjamin bahwa persengkongkolan tidak terjadi.

2) Perubahan

Banyak kebobohan terjadi pada sistem pengendalian intern pada suatu organisasi harus selalu dipengaruhi sesuai dengan perkembangan kondisidan teknologi

3) Kelemahan manusia

Banyak kebobohan terjadi pada sistem pengendalian intern yang secara teoritis sudah baik. Hal tersebut agar terjadi karena lemahnya pelaksanaan yang dilakukan oleh personal yang bersangkutan. Oleh karena itu, personal yang paham

dan kompeten untuk menjalankan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengendalian intern.

4) Azas atas manfaat

Pengendalian juga harus mempertimbangkan biaya kegunaannya, biasanya yang sering terjadi hanya untuk mengendalikan hal-hal tertentu melebihi kegunaannya atau manfaat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Adapun keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2002:181) adalah sebagai berikut:

1) Kesalahan dalam pertimbangan

Kesalahan dalam pertimbangan keputusan bisnis yang diambil biasanya dilakukan oleh manajemen atau personil lainnya. Kesalahan dapat disebabkan tidak memadai informasi yang diterima, keterbatasan waktu.

2) Gangguan

Adanya kekeliruan dalam memahami perintah, terjadi kesalahan karena kelainan dan perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personal atau dalam sistem dan prosedur yang ditetapkan.

3) Kolusi

Kerjasama antar pihak yang terkait yang sama seharusnya antara pihak-pihak tersebut saling mengawasi, tetapi saling bekerja sama untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja

4) Pengabaian oleh manajemen

Manajemen mengabaikan kebijakan dan sumber yang telah ditetapkan semata-mata untuk kepentingan pribadinya sehingga pengawasan intern tidak berfungsi secara baik.

5) Biaya lawan manfaat

Biaya yang telah dikeluarkan untuk penetapan pengawasan intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari adanya penerapan intern tersebut.

e. Prinsip-Prinsip Pengendalian Intern

Salah satu komponen pengendalian internal menurut COSO adalah aktivitas pengendalian (*control activities*) menunjukkan usaha perusahaan untuk mengidentifikasi resiko yang sedang dihadapi, seperti kecurangan (*Fraud*). Ada 6 prinsip dari pengendalian internal antara lain:

1) Penetapan tanggungjawab

Sesungguhnya karakteristik yang paling utama dari pengendalian adalah penetapan tanggungjawab ke masing-masing karyawan secara spesifik. Penetapan tanggungjawab agar masing-masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu yang telah dipercayakan kepadanya. Pengendalian atas pekerjaan tertentu akan lebih menjadi efektif jika hanya ada satu orang saja yang bertanggungjawab atas sebuah tugas atau pekerjaan tersebut.

2) Pemisahan tugas

Ada dua bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas yaitu:

- a. Pekerjaan yang berada seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda.
- b. Harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan asset dengan karyawan yang menangani langsung asset secara fisik. Ketika seorang karyawan bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan, biaya potensi munculnya kesalahan maupun kecurangan akan meningkat. Oleh sebab itu sangatlah penting kalau pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula.

3) Dokumentasi

Dokumentasi memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi yang telah terjadi dengan membubuhkan atau memberikan atau memberikan tanda tangan ke dalam dokumen, orang bertanggungjawab atas terjadinya sebuah transaksi sebuah transaksi atas peristiwa dapat diidentifikasi dengan mudah. Dokumen yang bernomor urut cetak sangat membantu untuk mencegah terjadinya transaksi yang tidak tercatat. Dokumen juga sesungguhnya sangat berfungsi sebagai pengantar informasi seluruh bagian komunikasi.

4) Pengendalian fisik, mekanik dan elektronik

Pengendalian fisik terutama terkait dengan pengaman asset. Pengendalian mekanik dan elektronik juga mengamankan asset. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan dari pengendalian fisik, mekanik dan elektronik yaitu:

- a. Uang kas dan surat-surat berharga sebaiknya disimpan dalam safe deposit box.
- b. Catatan-catatan akuntansi juga belum disimpan dalam filing cabinet yang terkunci.
- c. Tidak semua atau sembarangan karyawan dapat keluar masuk gudang tempat penyimpanan persediaan barang dagangan.
- d. Penggunaan camera dan televise monitor.
- e. Adanya sistem pemadam kebakaran alarm yang memadai.
- f. Penggunaan password sistem dan lain-lain.

5) Pengecekan independen atas verifikasi internal

Prinsip ini meliputi peninjauan ulang, perbandingan dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda. Untuk memperoleh

manfaat yang maksimum dari pengecekan independen atas verifikasi internal, maka:

- a. Verifikasi seharusnya dilakukan secara periode atau berkala atau bisa dilakukan atas dasar dadakan
- b. Verifikasi seharusnya dilakukan oleh orang yang independen. Ketidakcocokan atau ketidaksesuaian seharusnya dilaporkan ke tingkat manajemen dapat mengambil tindakan korektif secara tepat.
- c. Karyawan mungkin akan lupa, sengaja atau tidak mengikuti prosedur, atau ceroboh jika tidak ada orang yang meninjau ulang dan mengevaluasi pekerjaannya.

Cara yang paling mudah untuk verifikasi internal adalah dengan menerapkan pemisahan tugas seperti yang telah disebabkan sebelumnya. Dalam perusahaan besar, pengecekan independen ini sering dilakukan oleh auditor internal. Auditor disini adalah karyawan perusahaan yang bertugas melakukan evaluasi mengenai keefisiensian dan keefektivitas sistem pengendalian internal secara terus menerus.

2. Putang Usaha

a. Pengertian Piutang Usaha

Pada saat perusahaan menjual barang hasil produksinya, penjualan dapat dilakukan secara tunai atau secara kredit. Memberikan kredit berarti melakukan investasi kepada pelanggan. Penjualan secara kredit tersebut merupakan suatu upaya untuk meningkatkan penjualan. Dengan meningkatkan penjualan diharapkan terjadi peningkatan terhadap laba perusahaan.

Piutang usaha (*account receivable*) timbul akibat adanya penjualan kredit. Sebagian besar perusahaan menjual secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk dan jasa. Istilah piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Tingkat piutang perusahaan secara umum dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, harga produk, kualitas produk dan kebijakan kredit perusahaan. Manager keuangan perusahaan tidak dapat mengendalikan semua faktor tersebut, hanya kebijakan kredit saja yang dapat ditentukan.

Hubungan antara piutang dagang dan penjualan kredit dimana piutang dagang khususnya digunakan untuk tagihan yang timbul karena penjualan barang atau jasa secara kredit, dimasa pembeli tidak memberikan surat janji tertulis. Jadi secara real piutang dagang menunjukkan piutang yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dimana dalam keadaan normal perusahaan, biasanya piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari setahun. menurut Hadri (2008:198) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan piutang adalah sebagai berikut “ piutang dagang merupakan hak klaim atau tagihan berupa uang atau bentuk lainnya kepada seseorang atau suatu perusahaan”. Sedangkan menurut Horngren dan Harrison (2007:436) mendefinisikan “ piutang (*Receivable*) adalah klaim moneter terhadap pihak lain” Menurut Martono dan Harjito (2007 : 95), piutang dagang (*account receivable*) merupakan “tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk perusahaan”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.43 menyebutkan bahwa: piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha.

Menurut PSAK no. 9 :

Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan lain-lain yang diharapkan tertagih dalam satu atau siklus usaha normal diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

Menurut Rudianto (2009 : 224) yang dimaksud dengan piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu. Sedangkan menurut Her, S.E., M.Si. (2009:265) piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang atau jasa secara kredit maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain.

Sedangkan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia,1999), piutang dipakai dalam arti sempit, yaitu hanya menunjukkan tagihan yang akan dilunasi dengan uang. Piutang-piutang tersebut dapat digolongkan atas:

1. Piutang Usaha (*Trade Receivable*)

Piutang usaha merupakan segala tagihan dari penjualan barang-barang atau jasa yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan. Jika tagihan itu didukung dengan tagihan tertulis oleh debitur kepada perusahaan untuk

membayar pada suatu tanggal tertentu, piutang tersebut adalah piutang wesel.

2. Piutang lain-lain (Non Trade Receivable)

Merupakan tagihan yang tidak berasal dari penjualan barang maupun jasa dalam kegiatan normal perusahaan.

Untuk tujuan akuntansi, tagihan atau piutang disebut dapat dikelompokkan kedalam dua golongan sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikannya menjadi kas (jatuh tempo), yaitu :

1. Piutang Lancar

Meliputi tagihan-tagihan yang diharapkan akan diterima pelunasannya dalam tempo angka waktu satu tahun atau dalam periode siklus kegiatan normal perusahaan.

2. Piutang Jangka Panjang

Meliputi tagihan-tagihan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. Didalam neraca, harus disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar dan biasanya termasuk sebagai aktiva lain-lain.

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa piutang dapat diartikan perusahaan memiliki hak penagihan terhadap pihak lain yang menjadi langganannya dan mengharapkan pembayaran dari mereka agar memenuhi kewajiban terhadap perusahaan.

b. Kebijakan Penjualan Kredit

Kebijakan penjualan kredit merupakan pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah seorang pelanggan akan diberikan kredit dan jika diberikan berapa banyak jumlah kredit yang akan diberikan.

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam penjualan kredit sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasmir (2002:74), yaitu :

1. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Waktu

Yaitu suatu masa yang akan memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Degree of Risk

Yaitu tingkat resiko akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi pada masa yang akan datang.

4. Prestasi

Yaitu objek kredit yang tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga bentuk barang dan jasa.

Perusahaan-perusahaan yang tidak hanya mementingkan penentuan standart kredit tersebut secara tepat dalam membuat keputusan-keputusan kredit.

c. Manfaat Penjualan Kredit

Investasi pada piutang akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Penjualan kredit ini ditempuh dengan harapan agar bisa memperoleh penjualan yang lebih tinggi dari pada menjual secara tunai, karena itu perusahaan mengharapkan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Meskipun demikian, ada banyak biaya yang harus ditanggung. Pertama, ada kemungkinan piutang tak

terbayar. Kedua, perusahaan akan memerlukan dana yang lebih besar, dan semua dana mempunyai biaya. Karena itu perusahaan menanggung biaya dana yang lebih besar, oleh karena itu tambahan manfaat harus lebih besar dari tambahan pengorbanannya, agar pembentukan piutang tersebut bisa dibenarkan.

Gunawan Adisaputra (2003:43) mengemukakan manfaat penjualan kredit, antara lain :

1. Upaya untuk meningkatkan omset penjualan.
2. Meningkatkan keuntungan.
3. Meningkatkan hubungan dagang antara perusahaan dengan para langganan.
4. Manfaat keuntungan berupa selisih bunga modal pinjaman yang harus dibayarkan kepada bank sebagai sumber dana pembelanjaan piutang.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi piutang

Piutang sebagai salah satu unsur aktiva lancar dalam neraca memiliki perputaran yang cepat dan kurang dari satu tahun. Oleh karena itu, besarnya piutang tersebut.

Menurut Bambang Riyanto(2002:85) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang

1. Volume penjualan kredit

Makin besar volume penjualan kredit yang dilakukan, makin besar pula investasi yang ditanamkan dalam piutang. Semakin besarnya volume penjualan kredit tiap tahunnya berarti perusahaan itu harus menyediakan investasi lebih besar lagi dalam piutang. Makin besar jumlah piutang berarti makin besar risikonya, tetapi bersamaan dengan itu juga memperbesar profitabilitasnya.

2. Syarat Pembayaran Penjualan Kredit

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat berarti perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit dari pada profitabilitasnya semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin besar jumlah piutangnya.

3. Ketentuan tentang pembatasan kredit

Pembatasan kredit juga harus ditetapkan oleh perusahaan dalam memberikan kredit. Makin tinggi pembatasan kredit yang ditetapkan masing-masing langganan, berarti semakin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang.

4. Kebijakan dalam mengumpulkan piutang

Kebijakan pengumpulan piutang oleh perusahaan dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Apabila perusahaan menerapkan kebijaksanaan. Pengumpulan piutang secara pasif, maka investasi yang ditanamkan dalam piutang akan lebih besar.

5. Kebiasaan membayar dari para pelanggan

Kebiasaan membayar ini menyangkut pemanfaatan *diskon period*, semakin kecil investasi yang dinamkan dalam piutang.

Menurut Martono dan Agus Harjito (2008:95) besarnya investasi pada piutang yang muncul di perusahaan ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total. Kedua, kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang (jangka waktu penagihan piutang).

e. Administrasi Piutang

Pengendalian terhadap piutang harus diikuti dengan adanya suatu sistem administrasi yang baik. Administrasi piutang umumnya membantu dalam meminimalkan penyelewengan serta mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada pelanggan ataupun calon pelanggan. Manajemen piutang dapat dikatakan efektif apabila administrasi piutang dan sistem pengendaliannya disusun dengan secara teratur dan terarah. Hal ini mengakibatkan seluruh piutang dapat diketahui dan dikontrol dengan baik, sehingga penyelewengan atau kebocoran dana khususnya dalam hal ini dana piutang dapat dihindari atau diminimalkan. Selain itu, juga dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada pelanggan khususnya pelanggan kredit sehingga menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki perusahaan.

1. Tujuan administrasi piutang

Tujuan administrasi piutang adalah :

- a. Memberikan informasi penagihan untuk tepat waktu
- b. Meyakinkan jumlah piutang itu memang ada, dan bukan fiktif
- c. Menentukan tingkat kecairan, untuk mengelompokkan ke aktiva lancar atau aktiva lain-lain.
- d. Untuk mendapatkan dasar dalam membuat cadangan dan pengapusan piutang
- e. Untuk mengontrol apakah maksimum kredit masing-masing langganan terlampaui atau tidak.
- f. Sebagai sumber penelitian kondisi debitur
- g. Sebagai kontrol terhadap saldo buku besar piutang.

2. Fungsi bagian piutang

Agar tujuan administrasi dapat dicapai maka selayaknya setiap perusahaan, dalam hal ini perusahaan memiliki bagian khusus yang menangani hal-hal yang berhubungan dengan piutang, dimana bagian piutang memiliki fungsi seperti yang dikemukakan oleh Baridwan (2002:193) sebagai berikut :

- a. Membuat cadangan piutang yang dapat menunjukka jumlah kredit-kredit kepada tiap-tiap langkah. Hal ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui sejarah kreditnya, jumlah maksimum kredit dan keterangan lainnya yang diperlukan oleh bagian kredit.
- b. Menyiapkan dan mengirimkan surat pernyataan piutang.
- c. Membuat daftar analisa umur piutang tiap periode. Daftar ini digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan kredit yang dijalankan juga sebagai memo untuk mencatat kerugian piutang.

3. Prosedur Administrasi Piutang

Prosedur administrasi piutang yang umum dikenal menurut Samsul (2004:106) yaitu:

- a. File dokumen
- b. Kartu piutang
- c. Buku piutang

Untuk setiap metode diatas, langganan dapat dikelompokkan menurut :

- a. Nama dan alamat pelanggan
- b. Tanggal jatuh tempo pembayaran
- c. Kombinasi keduanya

4. Surat Pernyataan Piutang

Surat pernyataan piutang merupakan salah satu formulir yang menunjukkan piutang pada langganan untuk tanggal tertentu dan dalam bentuk surat pernyataan piutang tertentu disertai perincian pendukungnya. Bentuk-bentuk surat pernyataan piutang menurut Narko (2004:110) yaitu :

a. Surat pernyataan saldo akhir bulan (*balance of moment statement*)

Dalam surat pernyataan ini yang diinformasikan kepada pelanggan hanya saldo akhir satu bulan tertentu saja. Dengan demikian informasinya cukup ringkas. Surat pernyataan dibuat dengan mengutip saldo akhir yang ada pada rekening pembantu piutang pada pelanggan tertentu.

b. Surat pernyataan elemen-elemen terbuka (*open item statement*)

Berisi daftar faktur penjualan yang belum dilunasi, beserta tanggal dan jumlahnya. Digunakan bila pelanggan melunasi faktur.

c. Surat pernyataan tunggal (*unit statement*)

Dikerjakan dengan kartu piutang memakai karbon untuk mendapatkan tembusan selama satu periode (biasanya bulanan). Lembar pertama untuk surat pernyataan dan lembar kedua merupakan kartu piutang. Setiap bulan digunakan lembar baru, di mana lembar pertama dikirimkan kepada langganan dan lembar kedua disimpan sebagai buku pembantu piutang.

d. Surat pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional (*running balance statement with conventional account*)

Berisi keterangan yang sama dengan pernyataan tunggal, cara mengerjakan juga sama. Perbedaannya adalah tembusan yang merupakan

buku pembantu piutang tidak diganti tiap bulan tetapi buku pembantu piutang tersebut terus dipakai sampai penuh.

Laporan yang sering dibuat dalam administrasi piutang, menurut Samsul (2004, 355-358) yaitu :

- a. Rekening koran piutang
 1. Rekening koran tipe saldo akhir bulanan
 2. Rekening koran tipe saldo akhir unit terbuka
 3. Rekening koran tipe transaksi berjalan
- b. Daftar umur piutang

Dibuat tiap akhir bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pinjaman. Dipakai untuk menilai langganan yang menunggak pembayarannya.

f. Prosedur Penagihan

Ada 5 (lima) langkah prosedur penagihan menurut Samsul (2003:362-363) meliputi :

- a. menyerahkan faktur-faktur yang sudah hampir jatuh tempo dari pemegang arsip faktur kepada penagih.
- b. Penagih menyerahkan faktur kepada debitur yang bersangkutan, untuk dicek terlebih dahulu sebelum membayarnya.
- c. Penagih kembali kepada debitur pada tanggal yang dijanjikan oleh debitur untuk pelunasan hutangnya.
- d. Penagih menyetor hasil tagihan kepada kasir perusahaan.
- e. Mengambil faktur yang tidak terbayar kepada pemegang faktur semula.

Meskipun demikian debitur dapat membayar hutangnya dengan cara :

- a. Membayar langsung dan datang kepada perusahaan.

- b. Membayar melalui bank
- c. Kompensasi utang/piutang
- d. Membayar lewat penagih/kolektor

Menurut Lukman Syamsuddin(2007:273), cara pengumpulan piutang yang harus dilakukan oleh perusahaan bilamana langganan atau pembeli belum membayar sampai jangka waktu yang telah ditentukan, adalah:

1) Melalui surat

Apabila waktu pembayaran utang sudah lewat dari jatuh tempo, maka perusahaan dapat mengingatkan langganan tersebut bahwa hutangnya telah jatuh tempo dengan mengirimkan surat. Apabila hutang tersebut belum juga terbayar, maka dapat dikirimkan surat berikutnya yang lebih mempertegas dengan menggunakan nada yang keras.

2) Melalui telepon

Apabila setelah dikirim surat teguran ternyata hutang juga belum terbayar, maka pihak perusahaan dapat menelfon langganan secara pribadi dan memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Namun, apabila hasil percakapan tersebut ternyata misalnya pelanggan mempunyai alasan tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh pihak perusahaan, maka pihak perusahaan mungkin bisa memberikan keringanan waktu atau memperpanjang sampai jangka waktu tertentu.

3) Kunjungan personal

Melakukan kunjungan riba diketempat langganan sering kali digunakan karena dianggap efektif dalam usaha-usaha pengumpulan piutang.

4) Tindakan yuridis

Apabila pihak pelanggan tidak bisa membayar hutangnya, maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Adapun prosedur menurut Suad Husnan (2004:481), terhadap pelanggan yang telah Terlambat membayar hutangnya, umumnya dilakukan beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Mengirim surat teguran yang menjelaskan bahwa pelanggan telah terlambat untuk melunasi hutangnya.
2. Menghubungi pelanggan tersebut melalui via telepon secara langsung.
3. Menggunakan bantuan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang jasa pengumpulan piutang.
4. Menempuh jalur hukum atas pelanggan yang telah terlambat atau tidak membayar hutang.

3. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merefrensikan penelitian terdahulu. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan hasil dari penelitian terdahulu

Tabel III-1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul	Variabel/metode analisis	Hasil Penelitian
1	Dian Hartati (2009)	Analisis pengendalian intern piutang usaha pada PT. SFI Medan	Uji kualitatif terhadap pengendalian intern piutang usaha	Menunjukkan bahwa unsur pengendalian kurang efektif, sedangkan unsur lingkungan pengendalian

				informasi, komunikasi serta unsur pengawasan telah efektif.
2	A. Musliha M. (2009)	Analisis sistem pengendalian piutang pada PT. PLN (persero) wilayah Sultan Batara Cab. Makassar	RTO, ACP, Rasio tunggakan, Rasio penagihan	Menunjukkan Bahwa sudah optimal dalam menerapkan sistem pengendalian piutang untuk mengurangi jumlah piutang tidak tertagih.
3	Ria Agustina (2009)	Analisis efektifitas manajemen piutang pada PT. Unitex, Tbk.	Rasio keuangan, analisis horizontal dan vertikal, analisis deskripsi, analisis umur piutang (ACP)	Menunjukkan Bahwa pengelolaan piutang kurang baik, tergambar pada hasil analisis rasio keuangan.
4	Suwarno (2009)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Untuk meminimalkan Jumlah Piutang taktertagih Pada PT. Olympindo Multifinance (PT.OMF)	Uji kualitatif terhadap pengendalian intern piutang usaha	Menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal atas piutang berpengaruh dalam meminimalisasi jumlah piutang taktertagih PT. OMF karena besarnya persentase <i>past due</i> relatif lebih kecil daripada ketentuan yang ditetapkan perusahaan yaitu sebesar 12% untuk <i>past due</i> lebih dari 30 hari dan 6% <i>past due</i> lebih dari 60 hari.
5	Sernika	Analisis sistem	Uji kualitatif	Menunjukkan

	Apriani Lahagu (2016)	pengendalian intern persediaan suku cadang pada PT. Indonesia Asahan Aluminium Kuala Tanjung Sumatera Utara	terhadap pengendalian intern persediaan suku cadang	bahwa unsur pengendalian intern sudah cukup baik pada unsur lingkungan pengendalian dan penilaian resiko, tetapi pada unsur aktivitas pengendalian informasi, komunikasi serta unsur pengawasan belum memadai.
--	-----------------------	---	---	--

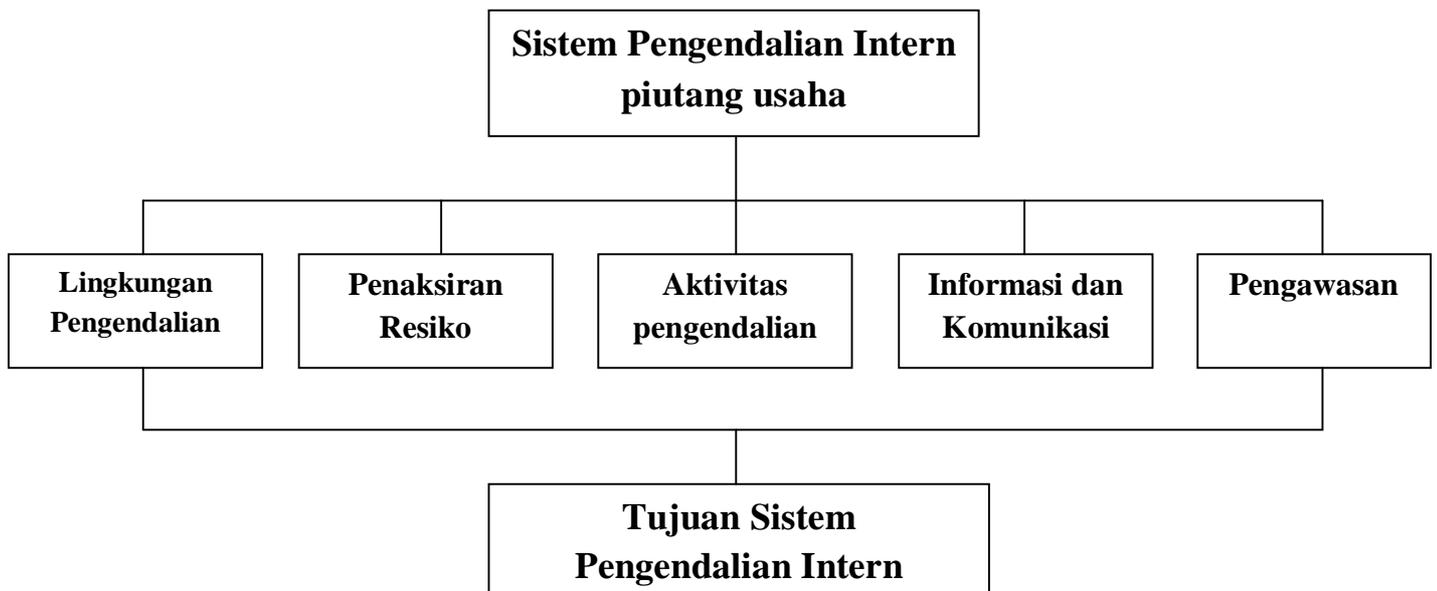
B. Kerangka Berfikir

Sistem pengendalian intern menurut Warren Reeve Fess (2006, hal,235) adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Sistem pengendalian intern mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat yang dapat dipercaya, melindungi kekayaan atau aktiva perusahaan dan meningkatkan efektivitas dari seluruh anggota perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu juga terdapat lima unsur pengendalian internal yang saling berkaitan agar suatu pengendalian internal dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO (*Commitee of Sponsoring Organisation*) terdiri dari 5 unsur yaitu : Lingkungan pengendalian, Aktifitas pengendalian, Penilaian resiko, Informasi dan komunikasi serta pengawasan.

Dengan adanya sistem pengendalian intern yaitu perusahaan mampu meminimalisir kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan sehingga resiko dari ketidaktertagihan pitang usaha yang tidak diinginkan perusahaan dapat dikelola dengan efektif.

Berdasarkan uraian diatas maka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar I-1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu penelitian ini akan mendeskripsikan sistem pengendalian piutang usaha pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

B. Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam hal ini peneliti ingin melihat sistem pengendalian intern dan piutang, dimana sistem pengendalian intern meliputi dari kelima unsur menurut Model COSO terdiri dari lima komponen unsur-unsur yang saling berhubungan yang akan menunjang pencapaian tujuan perusahaan.

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis lingkungan pengendalian pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan melihat struktur organisasi yang dapat

menjalankan dan menyelesaikan tugas *control* dan tanggungjawab masing-masing.

2. Penaksiran Resiko

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis penaksiran resiko pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan melihat pengendalian intern yang dilakukan perusahaan untuk mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan untuk meminimalkan resiko yang dapat merugikan perusahaan.

3. Aktivitas Pengendalian

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis aktivitas pengendalian PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan melihat kebijakan manajemen untuk mengantisipasi resiko. Peneliti ingin melihat aktifitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong akuransi *financial reporting*.

4. Informasi dan Komunikasi

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis informasi dan komunikasi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan melihat informasi dan komunikasi yang baik diperoleh dari eksternal maupun dari pengolahan internal merupakan potensi strategi.

5. Pengawasan

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis Pengawasan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan melihat pengawasan yang dilaksanakan perusahaan untuk meminimalkan piutang yang menumpuk dan piutang taktertagih.

Persentase piutang tak tertagih terlihat dari perbandingan antara jumlah piutang dan jumlah piutang taktertagih. Jumlah piutang yang diperoleh dengan

cara studi dokumentasi yaitu data yang sudah diolah dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana tingkat piutang tak tertagih terhadap total piutang sehingga dapat persentase piutang taktartagih pada PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang berlokasi Jl. Krakatau Ujung No.100 Tj. Mulia Medan-20241 Telp. (061) 6610220, Fax.6610906.

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2017 sampai April 2018. Adapun rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV-1
Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	Des 2017	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018
1.	PraRiset	■				
2.	Pengajuan judul	■				
3.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal		■			
4.	Seminar Proposal			■		
5.	Penyusunan Skripsi dan Bimbingan Skripsi				■	
6.	Sidang Meja Hijau					■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa penjelasan pernyataan yang tidak berbentuk angka-angka.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua sumber data yaitu :

1. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan bagian piutang usaha dan staff bagian keuangan yang ada diperusahaan.
2. Data sekunder yaitu merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder berupa buku-buku, laporan keuangan yaitu laporan neraca sampai laporan arus kas yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan yang berhubungan dengan piutang usaha dan lain-lain.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara :

1. Studi dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan berupa laporan neraca yang diperoleh dari

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dari tahun 2012-2016 untuk keperluan pembahasan penelitian.

2. Wawancara, yaitu dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian.

Wawancara dapat dilakukan apabila jumlah responden hanya sedikit.

Wawancara bisa dibedakan menjadi dua bentuk yaitu wawancara terstruktur/terpimpin : ada pedoman wawancara yang disiapkan oleh peneliti dan wawancara tidak terstruktur/tidak terpimpin : peneliti tidak mempersiapkan pedoman wawancara (Azuar,dkk. 2014, hal 69).

Tabel V-1

Kisi-Kisi Wawancara

Unsur Sistem Pengendalian Intern	Sub Indikator	Indikator Pertanyaan
Lingkungan Pengendalian	Nilai Etika dan Integritas.	§ Tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengerjakan tujuan.
		§ Organisasi yang menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
Penilaian Resiko	Karyawan Baru	§ perusahaan dalam merekrut karyawan berdasarkan kebutuhan dan standar yang ditetapkan § mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penyelewengan tagihan piutang
	Perubahan dalam lingkungan organisasi perusahaan.	§ perubahan dalam lingkungan organisasi perusahaan, dalam mempengaruhi sistem pengendalian intern
Aktivitas Pengendalian	Pengendalian Akuntansi	§ Pencatatan akuntansi

		saat terjadinya transaksi § Konfirmasi piutang kepada pelanggan § Tanggungjawab kredit penuh terhadap semua piutang usahanya.
	Pengendalian Administrasi	§ Penagihan piutang sesuai prosedur yang diterapkan.
Informasi dan Komunikasi	Informasi dan Komunikasi	§ Komunikasi direksi kepada karyawan § Pencatatan transaksi yang sewaktu-waktu dapat dilihat kembali.
Pengawasan	Pengawasan terhadap Siklus Penagihan Piutang Perusahaan	§ Pengawasan kepala bagian kepada bagian yang diawasinya. § Surat konfirmasi piutang kepada pelanggan.
	Pemantauan oleh Manajemen	§ pemeriksaan mendadak untuk menemukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas perusahaan § perusahaan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian intern
	Membatasi jumlah Piutang tidak Tertagih	§ batasan jumlah kredit yang ditetapkan perusahaan

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2004:11) “teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi

dalam mengambil keputusan. Data yang dianalisis yaitu dokumentasi dan wawancara :

1. Mengumpulkan data yaitu data laporan keuangan yang diperoleh dari bagian keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 untuk melihat perbandingan tiap tahun.
2. Mengelola data yaitu laporan keuangan yang telah dikumpulkan diolah dan dihitung sehingga dapat hasil piutang tak tertagih pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.
3. Menganalisis data yaitu data yang sudah diolah dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana tingkat piutang tak tertagih terhadap total piutang sehingga dapat persentase piutang takterttagih pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.
4. Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak yang dinilai berwenang dan mengetahui lebih banyak mengenai sistem pengendalian intern piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan bertujuan untuk melengkapi data mengenai sistem pengendalian intern dan memperjelas studi dokumentasi.
5. Menjelaskan dan menyimpulkan isi dari laporan keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang piutang usaha dan piutang takterttagih yang ada diperusahaan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan pada awalnya masa penjajahan Belanda adalah perusahaan dengan nama “Haven Bedrijf”. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada periode 1945-1950, perusahaan berubah status menjadi jawatan pelabuhan. Pada tahun 1969, jawatan pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan PNP.

Periode 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi lembaga pengusaha pelabuhan dengan Periode 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama perusahaan menjadi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun

1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 Nopember 1994, tambahan No. 87.

Berdasarkan Akta No.207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifan, SH., anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.800.000.000.000 (Rp1,8T) yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 (Rp 6,8 triliun) yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU. 05403.40.20.2014 tanggal 11 juli 2014.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero/ Perusahaan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, sedangkan pembinaan Teknis Operasional berada ditangan Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha

galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan perusahaan kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

b. Ruang Lingkup Perusahaan

Ruang lingkup PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan berusaha dalam bidang jasa pelabuhan. Adapun hal yang dapat dilaksanakan sebagai kegiatan usahanya yaitu :

- § Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal
- § Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal.
- § Penyediaan dan/atau pelayanan Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering, multi purpose, barang termasuk hewan (*general cargo*) dan fasilitas naik/turunnya penumpang dan/atau kendaraan.
- § Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, petikemas, curah cair, curah kering (*general cargo*), dan kendaraan; – Penyediaan dan/atau pelayanan

jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, multi purpose, penumpang, pelayanan rakyat, dan Ro-Ro

- § Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan
- § Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda; – Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi dan limbah serta pembuangan sampah
- § Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisianBBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan
- § Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan
- § Penyediaan dan pengelolaan Jasa Konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan
- § Pengusahaan dan penyelenggaraan depo petikemas dan perbaikan, *cleaning*, fumigasi, serta pelayanan logistik;

c. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam struktur organisasi terdapat kerangka yang menggambarkan wewenang, tanggung jawab, dan hubungan tiap bagian yang ada didalamnya. Struktur organisasi akan memudahkan dalam menentukan dan mengarahkan serta

mengawasi kegiatan operasi perusahaan. Oleh karena itu penting struktur organisasi dalam suatu perusahaan. Maka setiap perusahaan membuat struktur organisasi sendiri. Dalam menyusun struktur organisasi harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan serta sifat perusahaan agar dapat mengefisienkan dan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Adapun tipe struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan ini adalah bentuk organisasi garis. Dalam organisasi ini tugas-tugas perencanaan, pengendalian, pengawasan berada disatu tangan dan garis kewenangan (*lineauthority*) pimpinan langsung kebawah. Secara sistematis struktur organisasi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dapat digambarkan pada Gambar IV.1:

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Nomor: PR.02/1/21/P.1-09 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Kantor Pusat, berikut ini akan diuraikan pembagian tugas dan fungsi pada masing-masing bidang kerja pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

Berikut ini merupakan uraian tugas dan fungsi berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Nomor: UM.50/47/11/P.I-11 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance*.

1. Direktur Utama

Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada RUPS tentang kebijakan umum untuk menjalankan tugas pokok perusahaan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan KUPS.
- b. Melaksanakan tugas-tugas pokok perusahaan dan usaha lain.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh para Direktur Komersial dan Pengembangan usaha Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha membawahi 4 (empat) Bidang yang terdiri dari Bidang Pemasaran, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha, Bidang Bina Usaha dan Bidang Manajemen Resiko dan Manajemen Mutu.

2. Direktur Komersial

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan pemasaran jasa kepelabuhan serta penyusunan Trafik Produksi dan Pendapatan (TPP).
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan usaha dan penyusunan *Master Plan* dan Lingkungan.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan bina usaha.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan manajemen resiko dan manajemen mutu.

3. Direktur Operasi dan Teknik

Direktur Operasi dan Teknik membawahi 4 (empat) Bidang yang terdiri dari Bidang Pelayanan Kapal dan Barang, Bidang Teknologi dan Informasi, Bidang Peralatan dan Bidang Fasilitas. Direktur Operasi dan Teknik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kapal dan barang.
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan teknologi informasi.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fasilitas pelabuhan.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan peralatan pelabuhan.

4. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan membawahi 4 (empat) Bidang yang terdiri dari Bidang Akuntansi Manajemen, Bidang Akuntansi Keuangan, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Kemitraandan Bina Lingkungan. Direktur Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi manajemen.
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan perebendaharaan.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi keuangan.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan kemitraan dan bina lingkungan.

5. Direktur Personalia dan Umum

Direktur Personalia dan Umum membawahi 3 (tiga) Bidang yang terdiri dari Bidang Perencanaan Organisasi dan SDM, Bidang Administrasi dan Kesejahteraan SDM, Bidang Umum atau Kepala Kantor Pusat.

Direktur Personalia dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan, pengembangan organisasi dan pengembangan SDM.
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan hubungan administrasi dan kesejahteraan SDM.

6. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Satuan Pengawasan Intern membawahi 5 (lima) Pengawas dan Bidang yang terdiri dari Pengawas Wilayah I, Pengawas Wilayah II, Pengawas Wilayah III, Pengawas Bidang Khusus dan Tata Satuan Pengawasan Intern. Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penilaian sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian manajemen perusahaan.
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan keuangan dan operasional perusahaan.
- c. Penyelenggaraan dokumentasi laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan serta ketatausahaan.

- d. Pendorong pelaksanaan pengawasan melekat yang lebih efektif di perusahaan.
- e. Pendorong penerapan *Good Corporate Governance*.
- f. Sebagai mitra kerja dengan Komite Audit dan Pemeriksaan Eksternal dalam mengawasi pengelolaan perusahaan.

7. *Corporate Secretary*

Corporate Secretary membawahi 3 (tiga) *Assistance Corporate Secretary*(ACS) yang terdiri dari ACS Kesekretarian Direksi, ACS Hubungan Masyarakat dan ACS Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional.

Corporate Secretary mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Sebagai pejabat penghubung (*Liason Officer*) antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, *Regulator*, lembaga lain dan publik serta sebagai penanggung jawab sekretariat Perusahaan maupun sekretariat Direksi dan menatausahakan dokumen-dokumen perusahaan.
- b. Penyiapan pembinaan, penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Direksi.
- c. Penyiapan pembinaan, penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat.
- d. Penyiapan pembinaan, penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga dan hubungan internasional.
- e. Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance*.

8. Biro Hukum

Biro hukum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Perlindungan kepentingan perusahaan dan pemantauan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan atau perundangan yang berlaku.
- b. Penelaahan peraturan perusahaan.
- c. Pemberian bantuan dan pertimbangan hukum di dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Penyimpanan dokumen hukum dan sosialisasi peraturan perusahaan atau perundangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan program kerja dan menyelenggarakan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja.

9. Biro Logistik

Biro Logistik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pelaksanaan program kerja pengembangan sistem logistik perusahaan.
- b. Pembinaan dan pelaksanaan program kerja bidang pengadaan dan perbekalan bidang teknik dan non teknik.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan program kerja bidang administrasi dan ketatausahaan pengadaan barang dan jasa.

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Pengendalian Intern adalah proses kegiatan operasional organisasi dan merupakan kegiatan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar, pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar, bukan absolut, karena kemungkinan

kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas pengendalian intern membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

Sistem Pengendalian Piutang Usaha merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk meningkatkan volume penjualan bagi sebuah perusahaan. Diharapkan dengan meningkatnya volume penjualan, maka sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Namun ada beberapa resiko atas keberadaan piutang itu sendiri yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian terhadap piutang tersebut.

Pengendalian internal merupakan alat bantu bagi manajemen dalam pengendalian perusahaan termasuk untuk pengelolaan piutang usaha. Pengendalian internal yang diterapkan atas piutang usaha merupakan salah satu bagian dari pengendalian internal secara keseluruhan yang meliputi : pengendalian atas kondisi fisik dapat dipercaya data-data akuntansi mengenai piutang usaha, efisiensi pengelolaan, serta ditaatinya kebijakan dan prosedur yang mencakup pembelian, penyimpanan, pencatatan atas piutang usaha.

Sistem pengendalian intern pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum menerapkan unsur pengendalian secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

a. Prosedur pencatatan piutang usaha

Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang adalah

disebabkan oleh transaksi secara kredit. Penerimaan kas dari debitur, return akibat penjualan, dan penghapusan piutang.

Informasi mengenai piutang yang diperoleh kepada manajemen adalah:

1. Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur.
2. Pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur
3. Umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu.

Penyataan piutang merupakan unsur pengendalian intern yang baik dalam pencatatan piutang. Dengan mengirimkan secara periodik pernyataan piutang kepada debitur maka catatan piutang perusahaan dapat diuji ketelitiannya dengan menggunakan tanggapan yang diterima debitur dari pengiriman pernyataan piutang tersebut. Disamping itu pengiriman pernyataan secara periodik kepada para debitur akan menimbulkan citra yang baik dimata debitur mengenai keandalan pertanggungjawaban perusahaan. Hal ini dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dengan tujuan yang sama agar terbina rasa percaya yang baik antar debitur dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

b. Pengelolaan Piutang Usaha

Pada hakekatnya piutang yang terjadi pada perusahaan akibatnya adanya transaksi jual beli yang dilakukan secara kredit, sehingga timbul piutang. Dalam melakukan transaksi tersebut diperlukan persetujuan antara penjualan dan pembeli untuk merinci kewajiban yang resmi dan mengatur prosedur yang akan dijalankan. Apabila perusahaan menerima pesanan, maka bagian penjualan diminta memeriksa laporan piutang, apakah pembeli tersebut masih ada hutang yang belum terselesaikan. Jika bagian penjualan telah menyetujui maka segera akan dilaksanakan pengiriman dan pemberitahuan kepada pembeli, supaya

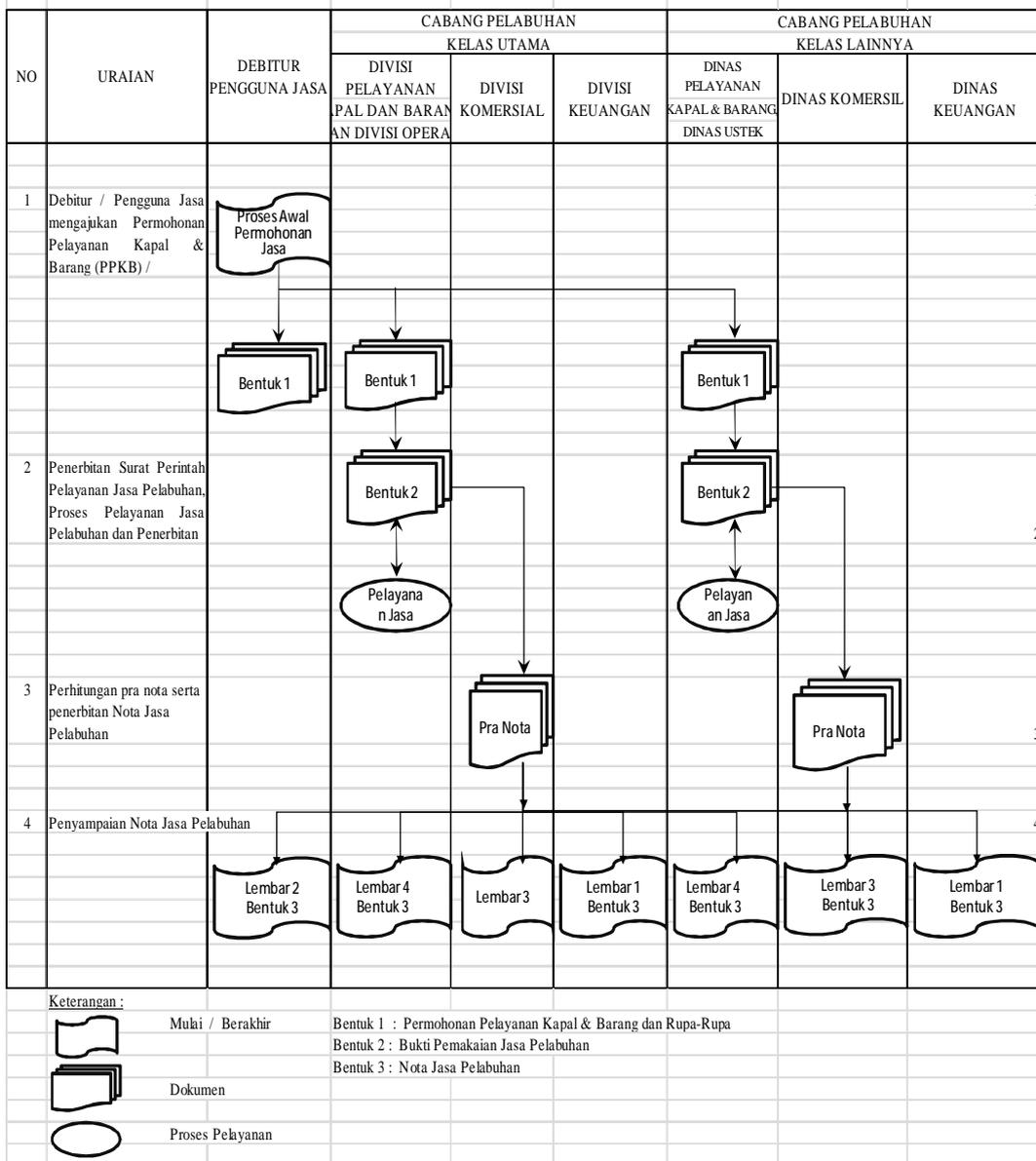
membayar uang muka sebagai pembayaran angsuran pertama dari rangkaian pembayaran kredit.

Piutang yang dimiliki perusahaan adalah piutang usaha, yang merupakan hasil dari penjualan jasa yang dilakukan oleh perusahaan kepada lebih dari satu pihak yang berbeda.

c. Prosedur Pelayanan Jasa sampai dengan penyampaian nota jasa pelabuhan

1. Debitur / Pengguna Jasa mengajukan Permohonan Pelayanan Kapal & Barang (PPKB) / Permohonan Jasa Rupa-rupa.
2. Penerbitan Surat Perintah Pelayanan Jasa Pelabuhan, Proses Pelayanan Jasa Pelabuhan dan Penerbitan Bukti Pemakaian Jasa Pelabuhan.
3. Perhitungan pra nota serta penerbitan Nota Jasa Pelabuhan
4. Penyampaian Nota Jasa Pelabuhan

SAMPAIDENGAN PENYAMPAIAN NOTA JASA PELABUHAN



Unsur-unsur pengendalian intern piutang pada perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

1. Lingkungan Pengendalian

a. Nilai Etika dan Integritas

Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan sudah memiliki kode etik dan sudah dikomunikasikan pada pegawai perusahaan juga akan menindak tegas pelanggaran terhadap kode etik dan integritas. Setiap pekerja dituntut untuk disiplin, jujur dan saling peduli terhadap pelanggaran yang dilakukan karyawan. Perusahaan memiliki pencegahan untuk mengurangi dorongan atau godaan kearah yang tidak etis sehingga dapat mengurangi kerugian bagi perusahaan.

b. Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan telah berjalan cukup baik.penerimaan calon pegawai perusahaan memperhatikan pendidikan dan kecakapan calon pegawainya. Sebagai karyawan pada PT. Pelabuhan Indonesia merupakan ahli dibidangnya masing-masing.

c. Filsafah Managemen dan Model Operasi

Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan memiliki kebijakan dan prosedur yang tertulis untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan dan telah dikomunikasikan kepada karyawan. Pimpinan tanggap terhadap laporan dari bawahan dan penyimpangan terhadap sistem pengendalian intern dan perusahaan juga menindaklanjuti segala bentuk penyimpangan. Perusahaan masih mempertimbangkan resiko bisnis dan melakukan pemantauan yang cukup. Pada pedoman pengendalian perusahaan menggunakan anggaran perusahaan.

d. Struktur Organisasi

Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan memiliki struktur organisasi yang telah dirancang dan disusun dengan baik yaitu secara fungsional. Penyusunan struktur organisasi ini sesuai dengan perusahaan BUMN PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Struktur Organisasi menggambarkan hubungan wewenang dan tanggungjawab. Sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan lebih memadai lagi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Kemudian perusahaan juga sudah memiliki uraian tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prosedur yang ada dilaksanakan oleh orang yang berbeda yaitu antara penerimaan kas, pencatatan kas dan konfirmasi piutang kepada pelanggan.

2. Penaksiran Resiko

a. Karyawan Baru

Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dalam merekrut karyawan berdasarkan kebutuhan dan standart yang ada dan yang telah ditetapkan. Dalam perekrutan pegawai baru harus memiliki kriteria seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja untuk membantu mencapai suatu tujuan yang diinginkan perusahaan.

b. Pertumbuhan yang Pesat

Diera pertumbuhan yang sangat pesat pelabuhan indonesia dituntut supaya dapat mempertahankan kenerja dengan baik. Semakin baik kinerjanya agar semakin memberi hal positif bagi perusahaan. Dalam mempertimbangkan kredit perusahaan sudah mempunyai daftar kredit pelanggan supaya lebih mudah menagih atau menginformasikan piutang kepada pelanggan. Persetujuan kredit yang diberikan perusahaan tidak harus berdasarkan daftar kredit pelanggan hal ini

yang dapat menimbulkan piutang taktertagi semakin meningkat karena tidak adanya batas-batas tertentu dalam menyetujui kredit pelanggan.

§ Untuk menghindari resiko terjadinya piutang yang terlewat dalam pencatatan dan untuk membantu mendapatkan saldo dalam konfirmasi saldo piutang pelanggan maka langkah yang diambil perusahaan dengan menggunakan buku pembantu piutang yang di *update* setiap harinya.

§ Resiko lain dari transaksi penjualan kredit adalah tidak tertagihnya piutang, saat ini diperusahaan jasa pelabuhan “PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan telah melakukan penyisihan sebagian dari laba untuk resiko piutang tidak tertagih yang dapat merugikan perusahaan.

3. Aktivitas Pengendalian

a. Pengendalian Akuntansi

Pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi guna meminimalisir ketidakcatatan atas transaksi yang terjadi dimasa lalu, dilakukan konfirmasi piutang tidak sesuai dengan konfirmasi piutang kepada pelanggan dan bagian kredit bertanggungjawab penuh terhadap tertagihnyab semua piutang pelanggan.

b. Pengendalian Administrasi

Faktur dibuat dengan bernomor urut tercetak guna mengetahui dan mengendalikan pengeluaran faktur. Meskipun bagian akuntansi yang menangani faktur namun pembuatan faktur dan pembukuan piutang penangananya dipisahkan artinya orang yang menanganinya terpisah hal ini memicu adanya piutang yang tidak dicatat karena *human error*. Untuk aktivitas pengendalian saldo piutang, perusahaan secara periodik mengirim pernyataan kepada setiap debitur untuk

menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh bagian pembukuan dan piutang sehingga piutang yang tidak tercatat akibat *human error* bisa diminimalisir.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan cukup baik. Hal ini dikarekan adanya komunikasi antara direktur sampai kepada karyawan. Perusahaan telah mencatat piutang secara komputerisasi sehingga jika sewaktu-waktu dapat memberikan informasi saldo piutang karena diadakan pembukuan piutang kedalam buku pembantu piutang secara periodik. Hal ini membantu perusahaan untuk menganalisa umur piutang pelanggan sehingga untuk pelanggan yang tidak tepat dalam pelunasan hutangnya maka perusahaan terus melakukan *Follow up* dan pemantauan pelanggan. Jika terjadi perubahan peraturan dalam perusahaan dengan cepat dikomunikasikan kepada pegawai.

5. Pengawasan

Pengawasan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan. Manajemen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan telah menggariskan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing personilnya secara jelas. Kelancaran piutang menjadi tanggungjawab bagi personil bagian piutang, karena setiap personil mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sudah di tentukan oleh bagian manajemen perusahaan.

Pengawasan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan pada piutang usaha masih belum efektif sehingga menyebabkan meningkatnya piutang taktertagih. Karena tidak dilakukannya pemeriksaan secara mendadak hal ini dapat memicu pegawai kepada pemanipulasian data piutang. Penyimpangan ini dapat merugikan perusahaan seharusnya perusahaan dapat melakukan pengawasan secara mendadak agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

Setiap kepala melakukan pengawasan terhadap bagian yang dikepalainya agar setiap pencatatan terhindar dari *Human Error*, dilakukan rotasi pada bagian-bagian tertentu perusahaan rawan terhadap penyelewengan hasil penagihan piutang perusahaan. Perusahaan juga memiliki tim auditor memeriksa I (Satu) tahun sekali dan dilakukan perbaikan dan mengevaluasi jika dalam pemeriksaan ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern. Tetapi tidak dilakukannya pemeriksaan secara mendadak untuk menemukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut yang diangkat penulis untuk melakukan analisis sistem pengendalian intern piutang usaha.

B. Pembahasan

Berdasarkan deskripsi data sebelumnya mengenai sistem pengendalian intern piutang usaha sistem pengendalian intern menurut COSO maka dibawah ini akan membahas hasil wawancara dan kaitannya dengan teori menurut COSO (*Committee Of Sponsoring Organization*)

Penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum memadai sebab masih terdapatnya peningkatan piutang tak tertagih bisa dilihat dari pengawasan. Menurut COSO

menyatakan sistem pengendalian intern terdiri atas lima komponen yang akan menunjang pencapaian tujuan perusahaan yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penaksiran Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan

Sistem pengendalian intern pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum menerapkan unsur pengendalian secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intren piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut.

Menurut Mulyadi (2002, hal 183), berikut ini adalah faktor-faktor lingkungan pengendalian dalam perusahaan : integritas dan nilai-nilai etika ; komitmen pada kompetensi; partisipasi dewan komisaris dan komite audit; filosofi dan gaya operasi manajemen; struktur organisasi; pemberian wewenang dan tanggungjawab; kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Didalam perusahaan seharusnya seluruh tindakan yang jujur dan yang tidak jujur secara menyeluruh diinvestigasi dan mereka yang bersalah harus dibebaskan.

Pegawai yang tidak jujur harus dituntut untuk membuat pegawai mengetahui bahwa perilaku semacam ini tidak akan diperbolehkan oleh perusahaan.

Menurut Marshall (2011, hal 232), lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini : komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika, filosofi pihak manajemen dan gaya berperasi, struktur organisasional, badan audit dewan komisaris, metode untuk memberikan otorisasi dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia dan pengaruh-pengaruh eksternal.

Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika merupakan hal yang sangat penting bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasional yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika perusahaan. Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi, dengan secara aktif mengajarkan dan mempraktikkannya. Pihak manajemen harus mengembangkan kebijakan yang tertulis dengan jelas, yang secara eksplisit menjelaskan perilaku yang jujur dan tidak jujur.

Hasil dalam penelitian ini, berdasarkan pertanyaan yang ada dalam daftar wawancara, mengenai lingkungan pengendalian yang dijalankan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, penerapan Standart Operasional Perusahaan (SOP) belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada, namun manajemen perusahaan tetap menjunjung tinggi integritas dan kompetensi, kerja sama antara satu bagian dengan bagian yang lain sangat diutamakan oleh pimpinan perusahaan. Karena hal ini sangat mendukung kelancaran operasional segala sesuatu yang ada dalam lingkungan perusahaan tersebut. Untuk meningkatkan SDM karyawannya, pemimpin perusahaan

berusaha terus melakukan pembinaan. Dimana karyawan dibekali ilmu untuk menjunjung kelancaran operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar tujuan yang digariskan oleh perusahaan dapat tercapai. Dan disamping itu dalam menggunakan struktur organisasi perusahaan juga sudah menetapkan job description.

2. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku, yaitu SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Berikut ini adalah resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan, sebagai berikut:

1. Perubahan lingkungan kerja
2. Penempatan orang-orang baru
3. Pembaharuan sistem informasi
4. Pertumbuhan yang pesat
5. Teknologi baru
6. Lingkungan aktivitas baru
7. Perubahan struktur organisasi.

Dalam penaksiran resiko perusahaan harus mampu melakukan identifikasi, analisis dan manajemen resiko serta bagaimana mengenai resiko-resiko yang dihadapi terdapat masalah yang mungkin akan muncul agar dapat menciptakan aktivitas pengawasan yang berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai penaksiran resiko manajemen pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum efektif dalam

melakukan penaksiran resiko. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa dalam salah satu pertanyaan ada menanyakan tentang pemeriksaan piutang usaha yang dilakukan secara mendadak, perusahaan belum melakukan hal tersebut bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Hery (2008, hal 168) pengecekan/pemeriksaan independen atau verifikasi internal dengan meninjau uang ataupun persediaan, dan pencocokan data yang disiapkan karyawan. Untuk memperoleh manfaat yang maksimum dari verifikasi internal maka verifikasi seharusnya dilakukan secara periodik atau berkala atau bisa juga atas dasar dadakan.

Persetujuan kredit yang diberikan perusahaan tidak harus berdasarkan daftar kredit pelanggan hal ini yang dapat menimbulkan piutang taktertagi semakin meningkat karena tidak adanya batas-batas tertentu dalam menyetujui kredit pelanggan. Akuntan memainkan peran penting dalam membantu manajemen mengontrol bisnis dengan mendesain sistem pengendalian yang efektif dan mengevaluasi sistem yang ada untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan efektif. Akuntan dapat mengevaluasi sistem pengendalian intern dengan menggunakan strategi manajemen resiko. Manajemen perusahaan harus mengidentifikasi salah satu atau beberapa pengendalian yang akan melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Dalam mengevaluasi keuntungan prosedur pengendalian internal tertentu, manajemen perlu mempertimbangkan keefektifan dan waktunya.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan yang membantudan memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian

mempunyai tujuan dan diterapkannya berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Aktivitas pengendalian meliputi penerapan berbagai prosedur untuk menjamin dipatuhinya kebijakan manajemen. Umumnya aktivitas pengendalian dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur berkaitan dengan review terhadap kinerja, penggolongan informasi, pengendalian catatan pada fisik dan aset, pemisahan tugas dan pemeriksaan independen atas setiap transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, aktivitas pengendalian pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan sudah baik karena dilakukannya pemisahan fungsi yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur, ataupun ketentuan yang berlaku, adanya otorisasi oleh bagian yang berwenang, setiap transaksi memiliki catatan dokumen yang lengkap, pemeriksaan independen atau verifikasi internal didalam sebuah sistem yang memasukkan pemisahan tugas secara efektif, sesuai Menurut COSO (Herry, 2013;96) bahwa pemisahan tugas disini dimaksudkan adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Ada dua bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas ini, yaitu pekerjaan berbeda harus dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula.

4. Informasi dan Komunikasi

Dalam penggunaan informasi dan komunikasi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dalam aktivitas piutang cukup memadai. Dimana laporan-laporan mengenai piutang sudah di input melalui komputerisasi dan dilaporkan untuk memberikan informasi pada laporan keuangan di bagian keuangan. Pencapaian pengendalian intern yang sudah efektif pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan melalui sistem online untuk pelayanan delivery dan receiving tanpa perlu lagi datang ke kantor TPKDB. Penggunaan jasa juga tidak

tidak perlu lagi melampirkan dokumen apapun karena data pesanan dan delivery online (DO) telah dikirim secara online oleh pelayaran atau container operator.

Sebelum menggunakan IBS pengguna jasa saat pengurusan dokumen memakan waktu lebih dari dua jam hingga tiga jam. Penyebabnya, yakni panjangnya antean mengajukan permohonan pelayanan receiving dan delivery diresepsionis. Sejak pakai IBS urus dokumen BICT dan TPKDB Cuma lima menit, pengguna jasa tinggal mengakses situs ibs.pelindo1.co.id untuk proses permohonan receiving dan delivery kemudian mencetak invoice dan SP2. Komunikasi yang berupa tindakan maupun lisanterutama yang berhubungan dengan proses penghimpunan sudah berjalan dengan baik, sehingga mempermudah pengendalian intern perusahaan.

Sesuai dengan pendapat Edy dalam siaran pers yang dikutip Bisnis.com menyatakan bahwa penerapan Sistem Integtrated Billing System bakal memberikan benefit dalam bentuk transparansi biaya, efisiensi penggunaan kertas, kemudahan tracking dalam permohonan serta pelayanan. Selain itu, pengguna jasa dapat mengetahui jumlah kapal yang sudah dibongkar setiap harinya.

5. Pengawasan

Pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh managemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan. Manajemen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan telah menggariskan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing personilnya secara jelas. Kelancaran piutang menjadi tanggungjawab bagi personil bagian piutang, karena setiap personil

mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sudah di tentukan oleh bagian manajemen perusahaan.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan juga mempunyai tim auditor independen yang mempunyai tugas memeriksa segala bentuk transaksi, terutama dalam hal yang menyangkut laporan keuangan dan tim auditor memeriksa 1 (satu) tahun sekali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tim auditor PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menyimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan unsur pengendalian dengan baik, hal tersebut dapat dilihat masih terdapatnya peningkatan piutang tak tertagih yang menjadi tanggungjawab divisi yang terkait.

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization) dalam buku audit sistem informasi (2007, hal 272) menyatakan bahwa salah satu komponen sistem pengendalian intern adalah pemantauan. Pemantauan merupakan proses yang menilai kualitas dari kinerja sistem dan *internal control* dari waktu ke waktu, yang dilakukan dengan melakukan aktifitas monitoring dan melakukan evaluasi secara terpisah. Terdapat dua mekanisme pemantauan yaitu pengawasan yang langsung dilakukan oleh masing-masing atasan pihak yang bersangkutan berdasarkan jenjang hirarki jabatan, dan pengawasan yang dilakukan oleh fungsi audit.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat dinyatakan bahwa semua unsur pengendalian intern piutang usaha telah dilakukan. Secara keseluruhan penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan berjalan dengan efektif, namun ada juga beberapa unsur yang masih perlu dilakukan peningkatan

pengawasannya. Penerapan tersebut sudah dapat sesuai dengan tujuan penerapan sistem pengendalian intern, adapun tujuan sistem pengendalian intern yaitu :

Tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga tujuan, menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization) menyatakan bahwa :

a. Keandalan informasi keuangan

Pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakaian laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.

b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan manajemen. Kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan merupakan alat pengendali dari berbagai kegiatan perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi.

c. Efektifitas dan efisiensi operasi

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan sistem yang dapat membantu pemimpin perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga dapat diarahkan pada tingkat yang paling efisien dan efektif guna mencegah kecurangan, penyelewengan dan pemborosan. Pengendalian ini berfungsi apabila

didalamnya tercakup tujuan yang merupakan arah dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Melindungi harta kekayaan perusahaan
2. Mengecek ketelitian dan catatan organisasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang dijalankan oleh perusahaan
3. Mendorong efisiensi kinerja perusahaan, sehingga dalam berbagai kegiatan dapat dilakukan penghematan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Dengan diterapkannya sistem pengendalian intern piutang usaha yang baik maka perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) akan dapat mencapai tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, perusahaan tersebut sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan dari sistem pengendalian intern tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha yang diterapkan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Sudah cukup memadai dilihat dari unsur-unsur pengendalian internnya, seperti lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi tetapi pada unsur pengawasan masih belum efektif.
2. Auditor internal telah melaksanakan pekerjaan audit cukup baik terdiri dari merencanakan audit, mengevaluasi dan menguji informasi, membuat laporan audit, mengevaluasi dan menguji informasi, membuat laporan audit dan menindaklanjuti hasil temuan audit serta memberikan rekomendasi atas kelemahan pengendalian internal yang ada.
3. Struktur organisasi perusahaan juga sudah menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang baik, khususnya untuk pemisahan fungsi pada sistem penjualan dan kredit.
4. Dalam perusahaan tujuan dari sistem pengendalian intern belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Terlihat masih meningkatnya piutang taktertagih. Hal ini dikarenakan ada beberapa unsur sistem pengendalian intern piutang usaha pada perusahaan belum berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti berusaha memberikan saran kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Sudah berupaya melakukan yang terbaik dalam sistem pengendalian intern piutang usaha perusahaan. Adapaun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan sistem pengendalian intern PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Agar dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kecurangan atau tindak akuratan dalam piutang usaha perusahaan.
2. Sebaiknya perusahaan melakukan survey terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman kepada calon peminjam, apakah calon peminjam memenuhi syarat atau tidak sehingga akan terhindar dari jumlah piutang tak tertagih
3. Sistem pengawasan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang ada sekarang dapat lebih ditingkatkan lagi, agar kemungkinan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan tidak akan terjadi.
4. Bagi peneliti berikutnya agar hasil skripsi sistem pengendalian intern piutang usaha bisa dijadikan referensi dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Retno Hayati (2012). “Analisis Efektifitas Pengelolaan dan Sistem Pengendalian Piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar”. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Antonio Harianto. (2013). “Analisa Sistem Pengendalian Internal Atas Sistem Persediaan Barang Dagang Pada PT. Bintang Makmur Bangkit Mulia Semarang”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Arsyina Lutfi Arrum Sari. (2015). “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Piutang TakTertagih Pada PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang”. Fakultas Ekonomi Akuntansi. Universitas Negeri Semarang.
- Arens, A Alvin. (2011). *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta : Salemba Empat.
- Astuty Dwi Novianti dan Asmara Hendra Komara. 2014. *Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) Pekanbaru Baru*. Program studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia. Jalan Ahmad Yani No. 78-88 Pekanbaru-Riau, www.stiepi.com
- Azuar, Juliandi, dkk. (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan
- B. Romney dan Paul John Steinbart. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Dyah Ayu Susilowati (2016). “Analisa Pengendalian Intern Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) Pada PT. Indomobil Finance Indoonesia Cabang Semarang”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Jalan Nakula 1 No. 5-11 Semarang.
- Hartati, 2006. Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. SFI Medan, Program Ekstrensi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/8953/1/10E00425.pdf>. Diunduh tanggal 25 November. Hal. 18.
- Habibie, Nabila. Jurnal EMBA. “Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT ADIRA Finance Cabang Manado”. Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal.494-502.
- Heri (2007). *Siklus Akuntansi Perusahaan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
-(2012). *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Institut Akuntan Indonesia. (2011). *Standart Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jonatan Sarwono dan Tutty Martadiredja. (2008). *Riset Bisnis Untuk Pengambilan Keputusan*. Bandung : Andi.
- Jogiyanto. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta.
- Kumaat, Valery.G. 2011. *Internal audit*. Erlangga. Jakarta.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Managemen*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta. Salemba Empat. Jakarta.
- Ricky Donald Runtu dan Inggriani Elim, (2016). Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Uniersitas Sam Ratulangi Manado.
- Sigit Hermawan dan Masy Had. (2006). *Akuntansi Untuk Perusahaan Jasa Dan Dagang*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi kelima. Lembaga Penerbit. Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. ALFABETA. Bandung.